



**BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 77
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2021, telah diatur Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perda tentang APBD, ayat (2) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD, ayat (3) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah, ayat (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPD, ayat (5) Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran, ayat (6) Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD atau pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang perubahan APBD dan ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Belanja Tidak Terduga, dinyatakan bahwa belanja keperluan mendesak lainnya, kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang harus segera dilaksanakan dan/atau kegiatan Pemerintah Daerah yang apabila tidak dilaksanakan akan mengganggu pelayanan masyarakat dan/atau mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah, perlu menggeser belanja langsung ke Belanja Tidak Terduga;

- d. bahwa penambahan pendapatan di Dana Perimbangan, penggeseran Belanja Tidak Terduga, perubahan uraian dalam sub rincian obyek belanja OPD, perubahan antar rincian obyek belanja OPD, penambahan pendapatan dan penyesuaian rincian anggaran bersumber Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan perubahan nama kegiatan dan rincian anggaran menyesuaikan pemetaan Kegiatan DAK;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK'07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Dampaknya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2017;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp1.578.872.013.759,00 berkurang sebesar Rp13.464.863.242,00 menjadi Rp1.565.407.150.517,00 dengan rincian sebagai berikut:

1 Pendapatan:

a. Semula	Rp.	1.561.077.793.439,00	
b. Berkurang	Rp.	13.464.863.242,00	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp		1.547.612.930.197,00

2 Belanja

a. Semula	Rp.	1.543.635.179.323,00	
b. Berkurang	Rp.	13.464.863.242,00	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.		1.530.170.316.081,00
Surplus	Rp		17.442.614.116,00

3 Pembiayaan :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	17.794.220.320,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.		17.794.220.320,00

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	35.236.834.436,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.		35.236.834.436,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan	Rp.		(17.442.614.116,00)
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.		0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp.	235.572.599.824,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.		235.572.599.824,00

b. Pendapatan Transfer			
1. Semula	Rp.	1.279.865.293.615,00	
2. Berkurang	Rp.	13.464.863.242,00	
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan			Rp. 1.266.400.430.373,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1. Semula	Rp.	45.639.900.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan			Rp. 45.639.900.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah			
1. Semula	Rp.	73.996.040.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan			Rp. 73.996.040.000,00
b. Hasil Retribusi Daerah			
1. Semula	Rp.	9.926.311.279,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan			Rp. 9.926.311.279,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1. Semula	Rp.	11.641.998.426,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp. 11.641.998.426,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
1. Semula	Rp.	140.008.250.119,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan			Rp. 140.008.250.119,00

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat			
1. Semula	Rp.	1.158.229.808.000,00	
2. Berkurang	Rp.	20.854.975.000,00	
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan			Rp. 1.137.374.833.000,00

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

1. Semula	Rp.	121.635.485.615,00		
2. Bertambah	Rp.	7.390.111.758,00		
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah			Rp.	129.025.597.373,00
setelah Perubahan				

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis:

a. Pendapatan Hibah

1. Semula	Rp.	7.190.000.000,00		
2. Bertambah	Rp.	0,00		
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan			Rp.	7.190.000.000,00

b. Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan

1. Semula	Rp.	38.449.900.000,00		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan setelah Perubahan			Rp.	38.449.900.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Operasi

1. Semula	Rp.	1.136.612.773.074,00		
2. Bertambah	Rp.	16.989.962.560,00		
Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan			Rp.	1.153.602.735.634,00

b. Belanja Modal

1. Semula	Rp.	221.963.290.033,00		
2. Berkurang	Rp.	27.841.158.084,00		
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan			Rp.	194.122.131.949,00

c. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp.	7.984.217.288,00		
2. Berkurang	Rp.	586.856.718,00		
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan			Rp.	7.397.360.570,00

d. Belanja Transfer

1. Semula	Rp.	177.074.898.928,00		
2. Berkurang	Rp.	2.026.811.000,00		
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan			Rp.	175.048.087.928,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a.	Belanja Pegawai sejumlah			
	1. Semula	Rp.	676.146.134.808,00	
	2. Bertambah	Rp.	5.048.833.492,00	
	Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp. 681.194.968.300,00
b.	Belanja Barang dan Jasa			
	1. Semula	Rp.	387.529.571.902,00	
	2. Bertambah	Rp.	12.188.095.268,00	
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan			Rp. 399.717.667.170,00
c.	Belanja Hibah			
	1. Semula	Rp.	56.926.866.364,00	
	2. Berkurang	Rp.	613.186.900,00	
	Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan			Rp. 56.313.679.464,00
d.	Belanja Bantuan Sosial			
	1. Semula	Rp.	16.010.200.000,00	
	2. Bertambah	Rp.	366.220.700,00	
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan			Rp. 16.376.420.700,00

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a.	Belanja Modal Tanah			
	1. Semula	Rp.	3.007.400.000,00	
	2. Berkurang	Rp.	2.575.850.300,00	
	Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan			Rp. 431.549.700,00
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
	1. Semula	Rp.	42.158.148.621,00	
	2. Bertambah	Rp.	10.476.514.874,00	
	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan			Rp. 52.634.663.495,00
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
	1. Semula	Rp.	73.097.643.535,00	
	2. Berkurang	Rp.	22.632.544.846,00	
	Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan			Rp. 50.465.098.689,00
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi			
	1. Semula	Rp.	98.429.786.530,00	
	2. Berkurang	Rp.	12.401.845.812,00	
	Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah perubahan			Rp. 86.027.940.718,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1. Semula	Rp.	5.270.311.347,00	
2. Berkurang	Rp.	707.432.000,00	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan	Rp.		4.562.879.347,00

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp.	7.984.217.288,00	
2. Berkurang	Rp.	586.856.718,00	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.		7.397.360.570,00

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Bagi Hasil

1. Semula	Rp.	8.392.235.128,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp.		8.392.235.128,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula	Rp.	168.682.663.800,00	
2. Berkurang	Rp.	2.026.811.000,00	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp.		166.655.852.800,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan

1. Semula	Rp.	17.794.220.320,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
		<hr/>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp.		17.794.220.320,00

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp.	35.236.834.436,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
		<hr/>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp.		35.236.834.436,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya:

1. Semula	Rp.	17.794.220.320,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
		<hr/>	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp.		17.794.220.320,00

b. Pencairan Dana Cadangan:				
1. Semula	Rp.	0,00		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan		Rp.		0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan:				
1. Semula	Rp.	0,00		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp.		0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah:				
1. Semula	Rp.	0,00		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan		Rp.		0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah:				
1. Semula	Rp.	0,00		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan		Rp.		0,00
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:				
1. Semula	Rp.	0,00		
2. Berkurang	Rp.	0,00		
Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		Rp.		0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan:				
1. Semula	Rp.	0,00		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan		Rp.		0,00
b. Penyertaan Modal Daerah (investasi) Pemerintah Daerah:				
1. Semula	Rp.	35.236.834.436,00		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
Jumlah Penyertaan Modal Daerah (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan		Rp.	35.236.834.436,00	
c. Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo:				
1. Semula	Rp.	0,00		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan		Rp.		0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah:

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah perubahan		Rp. 0,00

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan:		Rp. 0,00

Pasal 5

Ringkasan penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pelaksanaan penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 12 Juli 2021

BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO



Diundangkan di Wates
pada tanggal 12 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2021 NOMOR 43